

Legitimasi Hukum Terhadap Eksistensi Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Persepektif Hak Asasi Manusia

Putu Pramesti Hening Mas

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar

Email: pramestihm08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan eksistensi lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari persepektif hak asasi manusia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah LGBT memang diakui keberadaannya oleh masyarakat serta komunitas mereka berjuang untuk HAM mereka. Perlu digaris bawahi bahwa pemenuhan hak asasi setiap warga negara tidak serta merta tanpa pembatasan, termasuk dalam hal perilaku praktek LGBT negara bisa memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut komnas HAM yang dapat dipenuhi adalah hak-hak mereka terhadap kesehatan diri mereka yakni penyembuhan terhadap penyimpangan seksual. Seperti yang diketahui bahwa keberadaan LGBT berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kendati demikian hingga saat ini belum adanya peraturan yang menegakkan terkait eksistensi LGBT di Indonesia. Negara harus dapat segera memberikan sudut pandangannya sendiri terkait dengan eksistensi LGBT yang kian meningkat di Indonesia.

Kata kunci: Legitimasi hukum, Hak Asasi Manusia, LGBT

Abstract

This study aims to further examine the existence of lesbi gay bisexual, and transgender (LGBT) in Indonesia in terms of human rights perspective. This research utilizes the legislative approach and conceptual approach. The result of this research is that LGBT is recognized by the society and their community fights for their human rights. It should be underlined that the fulfillment of the human rights of every citizen is not necessarily without restrictions, including in terms of LGBT practice behavior, the state can provide restrictions in accordance with what has been established in the 1945 Constitution. According to the National Human Rights Commission, what can be fulfilled is their rights to their own health, namely the healing of sexual deviations. As it is known that the existence of LGBT is contrary to the values contained in Pancasila. However, until now there is no regulation that enforces the existence of LGBT in Indonesia. The state should be able to immediately provide its own point of view related to the increasing existence of LGBT in Indonesia.

Keyword: Legal Legitimacy, Human Right, LGBT